



Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI

## KOMITMEN PENDIDIKAN NEGARA ANGGOTA G20

**Yulia Indahri**  
Analisis Legislatif Ahli Madya  
[yulia.indahri@dpr.go.id](mailto:yulia.indahri@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Kemendikbudristek bersama para menteri pendidikan dari negara G20 yang tergabung dalam Kelompok Kerja Pendidikan (*Education Working Group/EdWG*) telah beberapa kali melakukan pertemuan baik daring dan luring. Selain para menteri pendidikan, pertemuan juga dihadiri oleh tamu undangan khusus serta organisasi internasional guna membahas masalah pendidikan di negara G20. Kerja sama tingkat global lintas negara dan budaya seperti EdWG sangat penting dalam menghadapi tantangan-tantangan kolektif yang membutuhkan solidaritas dan kemitraan. Kerja sama EdWG mengintegrasikan pendekatan, sumber pembelajaran, dan metode lainnya dalam kebijakan dan praktik sektor pendidikan.

Pertemuan di Bali pada 31 Agustus–2 September 2022 merupakan pertemuan keempat dan terakhir dari rangkaian pertemuan EdWG dan telah disusun dokumen laporan serta kompendium sebagai hasil kerja EdWG. Beberapa pertemuan sebelumnya dilaksanakan secara luring dan daring. Pertemuan perdana luring dilaksanakan di Bandung pada 16–18 Maret 2022. Pertemuan kedua secara daring pada 18–19 Mei 2022. Pertemuan ketiga dilaksanakan kembali secara luring pada 16–18 Maret 2022 di Yogyakarta.

Dokumen laporan hasil rangkaian pertemuan EdWG berisi pemetaan tantangan dan beragam strategi serta praktik-praktik baik di 26 negara dengan lebih dari 150 program kerja nyata di bidang pendidikan. Dokumen kompendium berisi upaya bersama untuk mendorong pemulihan, penguatan, dan transformasi sistem pendidikan global.

Selain kedua dokumen, Kemendikbudristek juga telah berhasil menyatukan suara di antara negara-negara G20 yang dijabarkan dalam hasil kerja Ringkasan Pimpinan Sidang (*Chair's Summary*). Inti dari Ringkasan 22 butir adalah kesepakatan para delegasi untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas, serta dukungan terhadap negara-negara lain untuk merancang dan menerapkan kebijakan pendidikan yang tangguh di masa depan. Kebijakan tersebut diharapkan berorientasi pada pemulihan pendidikan serta upaya mengatasi *learning loss* akibat pandemi untuk mencapai pendidikan berkualitas pada tahun 2030.

Empat isu prioritas EdWG G20 tahun ini berakar dari konsep Merdeka Belajar. Prioritas tersebut adalah: pendidikan berkualitas untuk semua; teknologi digital dalam pendidikan; solidaritas dan kemitraan; serta masa depan dunia kerja pascapandemi Covid-19. Hasil EdWG juga menggarisbawahi pentingnya peranan komitmen global dalam mentransformasi sektor pendidikan sesuai dengan komitmen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Menurut rencana, Kemendikbudristek akan membawa praktik baik hasil kerja EdWG ke pertemuan *Transforming Education Summit* (TES) di Sekretariat PBB, New York, Amerika Serikat, pada September 2022 dan forum internasional lainnya. Kantor UNESCO Indonesia juga akan membawa agenda prioritas EdWG ke pertemuan-pertemuan tingkat dunia yang digelar UNESCO sampai masa Presidensi Indonesia di G20 berakhir.

Dokumen laporan, kompendium, dan ringkasan pertemuan yang disampaikan Kemendikbudristek diwarnai nilai solidaritas dan gotong royong yang dimiliki Indonesia. Kepemimpinan Kemendikbudristek dalam EdWG membuka potensi-potensi gotong royong baru dengan negara lain, terutama negara anggota G20. Pada gilirannya semangat gotong royong akan sangat bermanfaat dalam mewujudkan sumber daya manusia unggul.

## Atensi DPR

Kinerja baik Kemendikbudristek melalui EdWG perlu diimbangi dengan kinerja yang seharusnya tidak kalah baiknya dalam menyusun beragam dokumen pendidikan nasional. Setelah resmi mengajukan RUU tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) dalam Program Legislasi Nasional per 24 Agustus 2022 kemarin, seharusnya semangat gotong royong juga menjadi akar penyusunan peraturan penting tersebut.

Melalui fungsi legislasi, Komisi X DPR RI perlu terus memastikan bahwa semangat gotong royong juga diterapkan dalam penyusunan RUU Sisdiknas. Saluran mengakses penyusunan RUU Sisdiknas perlu dipastikan selalu terbuka untuk memastikan partisipasi masyarakat, mengingat saat ini RUU sudah disampaikan ke DPR.

Fungsi pengawasan dilakukan Komisi X DPR RI dengan cara memastikan bahwa dokumen EdWG yang disampaikan benar-benar merupakan cerminan kondisi nyata di lapangan, bukan sekadar laporan kerja biasa tanpa target nyata untuk mewujudkan cita-cita pendidikan nasional dan sumber daya manusia unggul.

## Sumber

gk.kemdikbud.go.id, 7 September 2021;  
*Kompas*, 2 dan 3 September 2022.



Koordinator Sali Susiana  
Polhukam Puteri Hikmawati  
Ekkuinbang Sony Hendra P.  
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://puslit.dpr.go.id>

## EDITOR

**Polhukam**  
Simela Victor M.  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.



@puslitbkd\_official

©PuslitBK2022

## Ekkuinbang

Juli Panglima s.  
Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Venti Eka Satya  
Rafika Sari

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

## Kesra

Achmad Muchaddam F.  
Yulia Indahri  
Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.